

---

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA**

Arif Eko Wahyudi Arfianto  
Ahmad Riyadh U. Balahmar

(Prodi Ilmu Administrasi Negara - FISIP - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Jalan Majapahit 666 B Sidoarjo,  
email: arifeko@yahoo.com; riyadhadvokat@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat khususnya peternak bebek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi diantaranya dengan pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi peternak bebek, juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam membina, mengarahkan dan mengendalikan termasuk didalamnya membuka peluang pasar terutama luar pasar daerah. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu kemudahan untuk memperoleh bantuan modal usaha dari pihak perbankan, sehingga dengan demikian ditetapkanlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelompok tani ternak itik.

Kata kunci: pemberdayaan, masyarakat, pembangunan, ekonomi

## **COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT**

### **ABSTRACT**

*The purposes of this research were to describe the role of government and non-governmental in community economy empowerment and to know the supporting factors and inhibiting factors in community economy empowerment. Research methods used qualitative approach. Techniques analyzing of data in this research used model interactive. The result showed that government policy on Sidoarjo Regency in empowering people, especially duck farmers in the Kebonsari Village, Candi Sub-district. They give duck and facilitate for infrastructure. It shown that the respond of government to train, direct, and control community, as well as opened market especially in outside of local area. In the other hands, the facility is given by government through giving easily to get loan from the bank as capital. Thus, community decided to build duck farmers as empowering activity.*

*Keywords: empowerment, community, development, economy*

### **PENDAHULUAN**

Memasuki era globalisasi, yang utama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan yang lebih maju. Hal ini belum terlaksana sepenuhnya muncul krisis ekonomi dan pada gilirannya menimbulkan multi krisis yang merupakan beban masyarakat dan pemerintah serta benar-benar menjadi persoalan yang sulit diatasi. Seperti apa yang disampaikan diatas, masyarakat pelaku ekonomi kecil atau yang disebut UKM merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap kurang dan hanya membela kepentingan golongan ekonomi yang lebih maju. Sebenarnya secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak tertinggal jauh dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya. Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku-pelaku ekonomi lemah secara nyata. Untuk itu, setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam perspektif ini pula kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama sehingga upaya penanggulangannya menuntut keikutsertaan aktif semua pihak (Sumadiningrat, 1993).

---

Oleh karena itu, dalam era reformasi ini akan diusahakan pergeseran dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dengan kekuatan ekonomi rakyat, usaha kecil, termasuk petani kecil, peternak kecil, petani ikan, usaha menengah dan koperasi diberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar. Dengan demikian antar usaha kecil, menengah tidak ada yang dirugikan, bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 ayat (2) pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (2001) salah satu pemerintah daerah yang telah mengembangkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan revitalisasi dari Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 sampai tahun 2009, PPKM yang didesain sebagai program strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada pemberian peluang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat, keswadayaan dan kemandirian terutama pada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan kategori hampir miskin untuk mengembangkan usaha ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM), menggerakkan sektor riil dan peningkatan skala usaha dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia, sumber permodalan dan infrastruktur usaha maupun bantuan teknik lainnya dengan kebutuhan.

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui program-programnya telah banyak melakukan usaha pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Kobonsari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo seperti Gardu Taskin (Gerakan Mendukung Pengentasan Kemiskinan), bantuan langsung Desa Tertinggal Non IDT, JPS dan GKD (Gerakan Kembali ke Desa) dengan kebijakan utama pengembangan industri kecil atau industri rumah tangga. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peran pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? serta

---

(2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

## LANDASAN TEORETIS

### Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (Mardikanto, 2012).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi, 2010).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka

---

dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (Zubaedi, 2013).

Adi (2013), menjelaskan bahwa menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*);
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan yang digambarkan Hogan diatas tentunya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).

### **Pembangunan Ekonomi Desa**

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar

---

harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat (Arsiyah 2002).

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2004 sampai 2009 yang dituangkan dengan Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu menciptakan Indonesia yang aman damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2012). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data-data dari *key informan* dan informan (Ketua Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” Kepala Dinas Peternakan & Perkebunan, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Kepala Desa Kebonsari), catatan hasil observasi tentang kondisi dan kejadian yang ditemui selama dilapangan dan catatan hasil wawancara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif tersebut terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu: *data collecting* (pengumpulan data), *data reduction* (redaksi data), *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa**

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat khususnya peternak bebek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi diantaranya dengan pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi peternak bebek, juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam membina, mengarahkan dan mengendalikan termasuk didalamnya membuka peluang pasar terutama luar pasar daerah. Dalam hal ini sangat diperlukan peran Dinas Peternakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

Seperti dalam hasil wawancara, 30 April 2014 yang dituturkan oleh Ibu Nuning selaku staf Dinas Peternakan bahwa :

1. Sosialisasi mengenai penyakit yang dilakukan di balai desa Kebonsari.
2. Pembinaan sosialisasi.
3. Pemberian bantuan berupa ternak.
4. Pembantuan penataan buku administrasi kelompok
5. Pemberian vaksin setiap bulan.
6. Pengawasan terhadap penyakit menular.
7. Pembinaan kepada kelompok ternak
8. Pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa.
9. Penyuluhan setiap bulan.

Hal senada juga dituturkan oleh Ibu Retno selaku staf dari Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan pada 30 April 2014, maka peran dari Dinas Peternakan sebagai berikut:

*“... kegiatan yang aktif kami lakukan setiap bulannya untuk memberdayakan masyarakat yaitu: a) pengolahan hasil produksi; b) membantu pemasaran produk secara online; c) membantu memperkenalkan produk melalui brosur-brosur ...”* (Hasil wawancara Ibu Retno, 30 April 2014)

Pendapat tersebut dikembangkan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 April 2014 kepada Bapak Sudibyo selaku Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, beliau menuturkan bahwa peran dari Bagian Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Sidoarjo antara lain:

*“... a) fungsi koordinasi terhadap SKPD terkait dalam melakukan seleksi dan penetapan kampung/lokasi. b) Fasilitasi terkait dengan launching penetapan kampung/lokasi; c) Fasilitasi terkait dengan branding kampung/lokasi ...”* (Hasil wawancara Bapak Sudibyo, 16 April 2014)

---

## **Peran non-Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa**

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, peranan kelompok ini cukup signifikan dalam membina dan mengarahkan anggota-anggotanya yang terdiri dari beberapa peternak bebek, sebagaimana komentar yang disampaikan oleh ketua Kelompok Tani Ternak Itik Sumber Pangan yaitu Bapak Nur Hidayat menyatakan sebagai berikut :

*“... tugas kelompok disini sebenarnya sangat mudah, apabila karakteristik masing-masing anggota (peternak bebek) adalah sama, namun karena masing-masing anggota kelompok mempunyai pendapat dan kemauan yang berbeda, maka Kelompok Tani Ternak Itik ini mempunyai tugas yang cukup berat. Namun karena adanya semangat gotong-royong yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kebonsari ini, kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikurangi ...”* (Hasil wawancara Bapak Nur Hidayat, 2 Mei 2014).

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Khoiron bahwa:

*“... dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa kami, maka kami sangat senang dan ikut berpartisipasi di dalam pemberdayaan ini agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing-masing keluarga ...”* (Hasil wawancara Bapak Khoiron, 3 April 2014).

Hasil wawancara yang disampaikan tersebut merupakan ungkapan yang tulus dari seorang peternak bebek yang ada di Desa Kebonsari. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa didesanya, maka sebagian besar warga di Desa Kebonsari yang beternak bebek hidupnya kini menjadi sejahtera dan bahagia dengan apa yang sudah didapatnya selama ini. Begitu pula dengan adanya peranan dari pemerintah untuk membantu pemberdayaan masyarakat, seperti dilakukannya pembinaan kepada peternak, sosialisasi penyakit yang ada pada ternak mereka dan juga pemberian bantuan berupa ternak. Hal tersebut sangat membantu sekali kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Dengan berkembangnya usaha dari peternakan bebek maka penduduk yang memiliki ternak bisa meminta sertifikat produk dari pemerintah. Hal tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu kemudahan untuk memperoleh bantuan modal usaha dari pihak perbankan, sehingga dengan demikian ditetapkanlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelompok Tani Ternak Itik, adalah: 1) pembinaan usaha, 2) pembinaan koperasi, 3) pembinaan SDM dan 4) pengajuan bantuan modal usaha dengan fasilitas dari bank.

---

Adapun kegiatan yang dilakukan kelompok ternak sehari-harinya adalah: a) pemasaran telur, penampungan, pengendalian dan penetapan standart harga; b) pemenuhan pakan ternak (pengendalian kualitas telur); c) pemenuhan kebutuhan itik siap produksi; d) pengawasan dampak usaha terhadap lingkungan. Selain kegiatan tersebut kelompok ternak juga ada rencana kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pembagian alokasi sisa hasil usaha sesuai AD/ART.
- b) Dana sosial/partisipasi pembangunan diwujudkan dalam kegiatan peningkatan fasilitas publik seperti renovasi mushola, pembenahan jalan desa ataupun pemadatan jalan kampung dengan grasak/pasir kasar.
- c) Kegiatan penguatan modal usaha kelompok dalam hal pemenuhan kebutuhan sapronak.

Dengan adanya sertifikat produk maka usaha mereka bisa menjadi lebih baik. Salah seorang dari staf Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Retno menuturkan bahwa :

*“... saya pada waktu itu juga membantu pembuatan sertifikat produk ke Departemen Kesehatan agar usahanya bisa lebih maju dan produk telur bebeknya juga lebih berkualitas lagi ...”* (Hasil wawancara Ibu Retno, 30 April 2014).

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa**

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor yang mendukung Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kebonsari, yaitu:

- a) Dukungan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai pencetus kebijakan program, kemudian pemerintah kabupaten Sidoarjo yang menyertai dan mengawal program, dan sampai pemerintah desa Kebonsari yang memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” dan mengawasi kinerjanya. Dalam hal ini peran dari pemerintah kabupaten Sidoarjo adalah melakukan pengontrolan dan pemantauan pengelolaan Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan. Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” memiliki fasilitas pendukung dari Dinas Peternakan berupa penyemprotan kandang setiap 4 minggu sekali pada
-

musim kemarau dan 2 minggu sekali pada musim hujan. Dan diberikannya pemeriksaan berkala dari Dinas Peternakan juga pada bebek-bebeknya. Selain itu, Dinas Peternakan kerap memberikan seminar tentang unggas, untuk peternak unggas se-Sidoarjo. Selain mendapatkan fasilitas dari Dinas Peternakan, Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” juga menerima fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa dukungan dari Pemkab Sidoarjo dengan dibuatkan media promosi diinternet dan sering diajak mengikuti semiar UKM baik se-Sidoarjo maupun se-Jawa Timur.

- b) Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang program Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan”, serta berperan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat. Sedangkan keterlibatan masyarakat secara umum sangat dibutuhkan sebagai obyek sasaran utama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” ini.
- c) Antusiasme Masyarakat, bahwa dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dari pemerintah melalui Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan”, telah memacu antusiasme warga desa Kebonsari untuk turut serta mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok masyarakat untuk menciptakan atau mengembangkan suatu usaha mandiri dan hasilnya pun diharapkan akan dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi perekonomian keluarganya.

### **Faktor Penghambat**

Berdasarkan temuan dilapangan faktor yang menghambat non Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kebonsari, yaitu:

- 1) Tidak adanya laboratorium yang cukup bagus di Sidoarjo guna untuk keperluan ternak.
- 2) Pada waktu musim hujan bebek-bebek jarang berproduksi telur sehingga menurunnya produksi telur dikarenakan faktor cuaca.
- 3) Pada musim hujan juga sering terkena wabah penyakit yang melanda bebek-bebek sehingga bebek-bebek bisa mengakibatkan kematian.

Berdasarkan temuan dilapangan, faktor yang menghambat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kebonsari, yaitu:

---

- 1) Para peternak sudah merasa pengalaman dalam pemeliharaan ternak bebek. Sehingga tidak membutuhkan penyuluhan dan pembinaan lagi dari Dinas Peternakan.
- 2) Para peternak kurang berkenan terhadap pemberian penyemprotan pada kandang bebek mereka dikarenakan bisa mempengaruhi pada kondisi bebek-bebek mereka yang mengakibatkan turunnya hasil telur bebek.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Peran pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Desa Kebonsari sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kabupaten Sidoarjo :
    - 1) Sosialisasi mengenai penyakit yang dilakukan di balai desa Kebonsari.
    - 2) Pembinaan Sosialisasi.
    - 3) Pemberian bantuan berupa ternak.
    - 4) Pembantuan penataan buku administrasi kelompok
    - 5) Pemberian vaksin setiap bulan.
    - 6) Pengawasan terhadap penyakit menular.
    - 7) Pembinaan kepada kelompok ternak
    - 8) Pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa.
    - 9) Penyuluhan setiap bulan.
  - b. Peran Bagian Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Sidoarjo :
    - 1) Fungsi koordinasi terhadap SKPD terkait dalam melakukan seleksi dan penetapan kampung/lokasi.
    - 2) Fasilitasi terkait dengan launcing penetapan kampung/lokasi.
    - 3) Fasilitasi terkait dengan branding kampung/lokasi.
  - c. Peran Kelompok Tani Ternak Itik “Sumber Pangan” dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat khususnya peternak bebek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi diantaranya dengan pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi peternak bebek, juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam membina, mengarahkan dan mengendalikan termasuk didalamnya membuka peluang pasar terutama luar pasar daerah. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, peranan kelompok ini cukup signifikan dalam membina dan mengarahkan anggota-anggotanya yang terdiri dari beberapa peternak bebek.
-

- d. Keberhasilan atau kegagalan program ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa (studi pemberdayaan kampung bebek di desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) adalah adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Desa, dukungan masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:
- 1) Tidak adanya laboratorium yang cukup bagus di Sidoarjo guna untuk keperluan ternak.
  - 2) Pada waktu musim hujan bebek-bebek jarang memproduksi telur sehingga menurunnya produksi telur dikarenakan faktor cuaca.
  - 3) Pada musim hujan juga sering terkena wabah penyakit yang melanda bebek-bebek sehingga bebek-bebek bisa mengakibatkan kematian.
  - 4) Para peternak sudah merasa pengalaman dalam pemeliharaan ternak bebek. Sehingga tidak membutuhkan penyuluhan dan pembinaan lagi dari Dinas Peternakan.
  - 5) Para peternak kurang berkenan terhadap pemberian penyemprotan pada kandang bebek mereka dikarenakan bisa mempengaruhi pada kondisi bebek-bebek mereka yang mengakibatkan turunnya hasil telur bebek.

## 2. Saran

Dari temuan, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diambil beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi masalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Di Desa Kebonsari Kecamatan Candi :

- a. Tidak adanya laboratorium yang bagus di Kabupaten Sidoarjo membuat para peternak bebek kesulitan untuk mengilmiahkan beberapa temuan formula-formula yang sudah ada untuk mengatasi masalah penyakit bebek, maka dari itu perlunya dibangun laboratorium yang lebih bagus dan memadai guna untuk menjadi riset dan perkembangan ilmu.
  - b. Perlunya pemberian vitamin-vitamin yang bagus untuk ternak bebek agar bisa bertahan pada waktu musim hujan dan bisa menjaga jumlah produksinya agar tidak menurun dan juga agar tahan terhadap wabah penyakit yang melanda pada waktu musim hujan.
  - c. Perlu adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang salah satunya dilakukan upaya pembinaan yang lebih intensif dengan
-

memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun dilakukan studi banding ke daerah penghasil telur bebek lainnya.

- d. Terbatasnya kemampuan modal usaha bagi peternak bebek, maka perlu diberikan kemudahan dalam dukungan modal atau minimal diberikan kemudahan dalam prosedur untuk memperoleh kredit usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali pers.

Arsiyah. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Edi, Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mardikanto dan Soebianto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publi*. Bandung: ALFABETA.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soemodiningrat, Gunawan. (2009). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA dan Pustaka Pelajar.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

---

